BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan (Irfan, 2017).

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan

secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life* (Ulya, 2011).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk:

- a) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- b) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum;
- c) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman;
- d) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau;
- e) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;
- f) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;
- g) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan;
- h) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan;
- i) Hak rakyat untuk berinovasi;
- j) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
- k) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Sahdan, 2005).

Islam memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib diperhatikan, bahkan Ali bin Abi Talib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya”, sedemikian penting masalah kemiskinan ini, karena jika kemiskinan merajalela, akan banyak kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini, akan banyak kejahatan akibat penderitaan dari kekurangan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka

menyelamatkan aqidah, akhlak dan laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Islam memberikan solusi agar manusia giat bekerja dan berusaha untuk kehidupannya agar tidak terjerumus ke lembah kemiskinan, serta menganjurkan umatnya untuk peduli kepada sesama serta senang memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan (Ulya, 2011).

Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum ayat 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Terdapat persoalan yang sebetulnya memerlukan penanganan serius dan sangat penting, dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. yakni kurang meratanya pembangunan yang ada desa sehingga memicu kesenjangan antara kota dan desa. Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Menurut informasi yang saya dapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terpotret hasil finalisasi pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan pada tahun 2019, melalui pengisian kuesioner yang dilakukan di 149 desa yang ada saat ini, yang melibatkan unsur penting para pendamping desa dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sarolangun, secara umum Kabupaten Sarolangun berada di level desa dengan status berkembang menuju status maju dan mandiri (Ansory.s , 2019).

Mengacu pada status desa sangat tertinggal pada tahun 2016 sebanyak 27 desa dan status tertinggal sebanyak 83 desa. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mulyadi menyebutkan, pada grafik validitas Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 terjadi penurunan persentase jumlah desa berstatus sangat tertinggal menjadi 23 desa, dan 76 desa berstatus tertinggal. selanjutnya pada tahun 2019 desa yang berstatus sangat tertinggal sebanyak 1 desa dari 23 desa di tahun sebelumnya, dan status desa tertinggal menjadi 66 desa. Sementara 75 desa berstatus berkembang dan 7 desa berstatus maju (Ansory.s , 2019).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk miskin
1	Batang Asai	23	20.904	1.950
2	Limun	16	21.528	1.584
3	Sarolangun	10	22.038	1.284
4	Pauh	13	20.990	2.765
5	Pelawan	14	37.935	2.779
6	Mandiingin	28	40.212	2.691
7	Air Hitam	9	29.758	3.326
8	Batin VIII	14	19.744	1.882
9	Singkut	12	35.899	3.260
10	Cerminanan Gedang	10	14.660	1.890
Jumlah				23.411

Sumber Data : Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sarolangun diolah

Dari data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Air Hitam adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Sarolangun, sedangkan Kecamatan Air Hitam hanya memiliki 9 desa lebih sedikit dibandingkan kecamatan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-

undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah Dana Desa.

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai Program Pemerintah Desa. Tujuan penggunaan Dana Desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.2
Jumlah Dana Desa di Kecamatan Air Hitam 2019

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	Jernih	3.356	1.191.759.000
2	Desa Baru	2.966	1.036.560.000
3	Semurung	2.160	1.242.688.000
4	Lubuk Kepayang	1.878	907.370.000
5	Pematang Kabau	3.679	986.171.000
6	Mentawak Ulu	3.084	957.700.000
7	Bukit Suban	6.463	1.113.476.000
8	Lubuk Jering	2.343	889.826.000
9	Mentawak Baru	3.829	952.246.000
Jumlah			29.758

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sarolangun diolah

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah dana desa tertinggi di desa Semurung yaitu sebesar Rp 1.242.688.000. dan jumlah dana desa terendah di desa Lubuk Jering yaitu sebesar Rp 889.826.000.

Dengan adanya dana desa maka diharapkan bertambahnya pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Bersamaan dengan hal tersebut perlu adanya persepsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dapat dikaji lebih dalam karena masalah yang berkembang saat ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, sehingga munculnya dugaan penyelewengan dana desa oleh aparatur desa. Oleh karena itu perlu mengantisipasi hal tersebut dalam pengelolaan dana desa. Persepsi masyarakat yang kurang baik tentang pemanfaatan dana desa akan menciptakan dugaan-dugaan yang tidak baik terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga perlu meningkatkan persepsi masyarakat dengan baik (Solichin,2018).

Rakhmat (2011) mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, kejadian, atau hubungan-hubungan yang didapatkan tentang cara mengambil kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli), serta kesadaran pemikiran mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan yang dilakukan individu melalui alat indera tentang objek, peristiwa, dan pengalaman dari lingkungannya sehingga individu menyadari dan merespon terhadap stimulus

tersebut. Dalam hal ini tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat (Desti, 2016).

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Semurung Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik masyarakat desa Semurung kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di desa Semurung kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun di tinjau dalam perspektif ekonomi Pembangunan Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat desa Semurung Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk menganalisis Persepsi Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di desa Semurung kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun di tinjau dalam perspektif ekonomi Pembangunan Islam

1.4 Mamfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Persepsi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Semurung kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Dan juga dapat

memberikan masukan (input) bagi aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas demi terwujudnya bentuk pemerintahan desa yang lebih baik lagi di masa mendatang.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan dan sebagai sebagai bahan pertimbangan, dan evaluasi bagi stakeholders terkait pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini khususnya bagi pemerintah desa sebagai pengelola dana desa.